



MEMPERKUAT SISTEM KESEHATAN MASYARAKAT:
Kertas Kebijakan tentang Strategi
Gizi Terpadu untuk Penurunan Stunting

MEI 2024

BISA
stop stunting!

 **NUTRITION**
INTERNATIONAL

 **Save the Children**



1.0 LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki statistik gizi yang paling mengkhawatirkan di dunia, dengan tiga beban malnutrisi yang tinggi (keselarasan dari kekurangan gizi, kelebihan berat badan, dan defisiensi zat gizi mikro).¹ Sekitar satu dari empat anak balita mengalami stunting,² sementara 8% mengalami kelebihan berat badan.³ Sekitar satu dari empat remaja putri menderita anemia, sementara prevalensi anemia di kalangan ibu hamil mencapai 48,9%.⁴

Defisiensi vitamin A masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat pada anak usia 6–59 bulan di Indonesia, dengan hanya 53% yang menerima dua dosis vitamin A pada tahun 2018.⁵ Diare juga merupakan masalah kesehatan yang serius di kalangan anak-anak di Indonesia, dengan 12,3% anak mengalami gejala diare pada tahun 2018.⁶ Anak-anak yang mengalami stunting menerima asupan vitamin A 10% lebih rendah sepanjang hidup mereka, sementara anak-anak yang kelebihan berat badan mempunyai risiko lebih tinggi terkena

penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola makan yang menyebabkan Indonesia harus mengeluarkan biaya miliaran dolar untuk pengobatan dan kehilangan produktivitas. Salah satu perkiraan menunjukkan bahwa total biaya malnutrisi di Indonesia mencapai 3% dari PDB.⁷

Untuk mengatasi stunting dan masalah kesehatan terkait, Pemerintah Indonesia meluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting) pada bulan Agustus 2017. Stranas Stunting bertujuan untuk mendorong konvergensi program-program pencegahan stunting di tingkat nasional, daerah, dan desa untuk memastikan koordinasi dan alokasi anggaran yang lebih baik untuk intervensi. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden No.72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menjadi landasan implementasi Stranas Stunting.

1 Haddad, L., Cameron, L., & Barnett, I. (2015). Beban ganda malnutrisi di Asia Tenggara dan Pasifik: prioritas, kebijakan dan politik. *Kebijakan dan perencanaan kesehatan*, 30(9), 1193-1206.

2 Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), 2021

3 Survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018

4 Riskesdas 2018

5 Riskesdas 2018

6 Riskesdas 2018

7 Thomas M, Yamano T (2022). [Pangan Saja Tidak Akan Mengatasi Malnutrisi di Indonesia](#). *Asian Development Bank (Pangan Saja Tidak Akan Mengatasi Malnutrisi di Indonesia | Asian Development Blog (adb.org))*.

2.0 MEMPERKUAT SISTEM KESEHATAN MELALUI BETTER INVESTMENT FOR STUNTING ALLEVIATION (BISA)

BISA adalah proyek gizi spesifik dan sensitif terpadu yang dirancang untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan Stranas Stunting. Dilaksanakan di empat kabupaten (Sumedang, Bandung Barat, Kupang, dan Timor Tengah Utara) di provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur, BISA terdiri dari intervensi berdampak tinggi yang berbasis bukti dalam 1.000 hari pertama kehidupan anak, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, dan masa remaja (10-19 tahun). Salah satu tujuan strategis BISA adalah untuk menghasilkan pembelajaran yang memberikan informasi kepada para pengambil keputusan dan para pihak yang memiliki pengaruh untuk mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, dan mendukung intervensi penurunan stunting yang berdampak tinggi.

Bidang intervensi BISA meliputi gizi remaja (suplementasi tablet tambah darah remaja putri serta pendidikan gizi), kelangsungan hidup anak (suplementasi vitamin A dan penanggulangan diare) serta kesehatan dan gizi ibu dalam konteks Stranas Stunting. Prioritas proyek ini adalah membangun kapasitas sistem kesehatan untuk memberikan layanan gizi penting yang berkualitas di tingkat masyarakat dan memastikan bahwa sistem tersebut mendukung dan mempertahankan upaya-upaya ini. Berdasarkan mandatnya, BISA memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka untuk gizi dan

mengoperasionalkan kebijakan serta rencana strategis. BISA juga bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat sistem manajemen dan akuntabilitas yang memfasilitasi pelaksanaan intervensi berbasis bukti, hemat biaya, dan berkelanjutan di tingkat rumah tangga dan masyarakat.

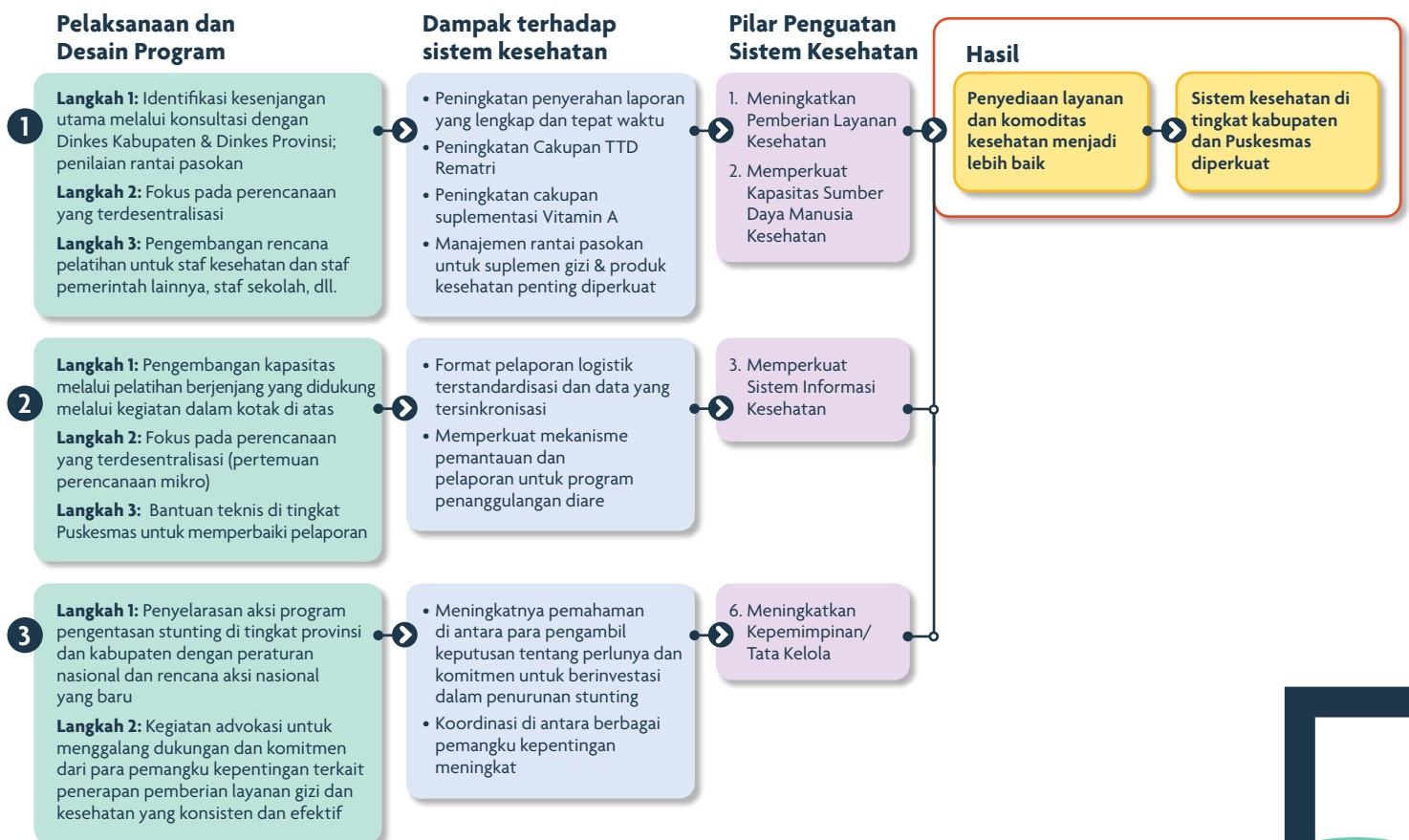
Kerangka kerja Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk penguatan sistem kesehatan meliputi enam pilar utama:

- 1 penyedia layanan kesehatan
- 2 tenaga kesehatan
- 3 sistem informasi kesehatan
- 4 akses terhadap obat-obatan penting
- 5 pembiayaan, dan
- 6 kepemimpinan/tata kelola

Di antara pilar-pilar penguatan sistem kesehatan, BISA dirancang untuk mendukung pilar 2, 4, dan 6. Karena adanya interkoneksi antar pilar, telah terjadi perbaikan pada pilar 1.

Makalah ini akan menggambarkan perbaikan yang dicapai melalui intervensi BISA berdasarkan empat pilar tersebut dan memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk memperluas aksi penguatan sistem kesehatan serupa yang bertujuan untuk menurunkan stunting di Indonesia.

Kerangka kerja dan aksi BISA untuk meningkatkan penguatan sistem kesehatan





2.1 Memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan

Tenaga kesehatan yang berfungsi dengan baik merupakan pilar penting dari sistem kesehatan yang responsif dan efektif.⁸ Kegiatan BISA meliputi pengembangan kapasitas tenaga kesehatan.

- Modul pelatihan telah dikembangkan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan. Materi-materi tersebut dikembangkan melalui konsultasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi (Dinkes Provinsi) agar selaras dengan kebijakan dan pedoman terkini dari Kementerian Kesehatan.
- Pelatihan penyegaran berkala diberikan untuk memastikan bahwa staf Dinas Kesehatan Kabupaten (Dinkes Kabupaten) dan Puskesmas mempertahankan kompetensi dan pemahaman mereka tentang kebijakan dan pedoman.

Dalam dua tahun pertama proyek ini, BISA menyelenggarakan total 31 pelatihan,⁹ mendukung 91 pertemuan bantuan teknis dan mengembangkan beberapa alat bantu advokasi dan pengawasan yang mendukung bagi staf Puskesmas dan guru sekolah. Bekerja sama dengan Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur, BISA juga mengembangkan modul suplementasi Tablet Tambah Darah Remaja Putri (TTD Rematri) dan mengadakan Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainers/ToT) untuk staf Dinkes Kabupaten. ToT ini dilanjutkan dengan pelatihan berjenjang dan orientasi yang dilaksanakan di 55 Puskesmas,¹⁰ yang diikuti oleh 253 peserta, termasuk staf gizi dan guru unit kesehatan sekolah (UKS).

Kegiatan pengembangan kapasitas ini menghasilkan beberapa perbaikan sebagai berikut:

Peningkatan penyerahan laporan yang lengkap dan tepat waktu. Berdasarkan hasil tes sebelum dan sesudah pelatihan yang dikembangkan oleh BISA, skor menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan peserta.¹¹ Terjadi peningkatan pada staf Puskesmas dan guru UKS dalam memasukkan data yang lengkap dalam laporan, yang berdampak pada peningkatan penyampaian laporan program TTD Rematri. Sebelum adanya kegiatan pengembangan kapasitas BISA, hanya 38% Puskesmas yang menyampaikan laporan program TTD Rematri. Setelah pelatihan, pengiriman laporan meningkat menjadi 69% dan dipertahankan di angka 78% selama kuartal terakhir tahun 2022.

Peningkatan cakupan TTD Rematri. Di seluruh kabupaten intervensi, perbaikan yang signifikan telah dicatat dalam implementasi program TTD Rematri. Pada tahun 2020, hanya 35% remaja putri yang bersekolah yang dapat dijangkau oleh TTD Rematri.¹² Pada tahun 2022, 92% remaja putri yang

bersekolah telah dijangkau oleh program ini. Cakupan ini dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang ditargetkan untuk meningkatkan pengetahuan di kalangan remaja putri tentang pentingnya TTD Rematri.

Seluruh Puskesmas dan sekolah yang menjadi target BISA diberikan materi Komunikasi Perubahan Perilaku dan Sosial (KPPS) TTD Rematri untuk mendukung para guru dan pakar gizi dalam memberikan pendidikan gizi. Seiring dengan dibukanya kembali sekolah-sekolah setelah pandemi COVID-19,¹³ penggunaan materi KPPS yang lebih sering membantu meningkatkan pemahaman di kalangan remaja putri tentang gizi seimbang, yang berkontribusi pada peningkatan konsumsi suplemen TTD. Persentase remaja putri yang mengonsumsi 12 tablet TTD dengan dosis yang direkomendasikan WHO setiap tahunnya¹⁴ meningkat dari 22% pada tahun 2021 menjadi 63% pada tahun 2022. Tidak ada data konsumsi yang tersedia untuk tahun 2020 karena penutupan sekolah selama pandemi.

Peningkatan cakupan suplementasi vitamin A. Di wilayah intervensi, 94,2% (191.217) dari 203.095 anak usia 12–59 bulan menerima setidaknya dua dosis vitamin A pada tahun 2020. Selama gelombang kedua COVID-19 yang mematikan pada tahun 2021, BISA terus memberikan bantuan teknis secara intensif dan berkoordinasi dengan Dinkes Kabupaten, Puskesmas, dan pemangku kepentingan utama di desa-desa untuk menekankan pentingnya suplementasi vitamin A dan program zat gizi mikro lainnya untuk mencegah stunting. Dukungan berkelanjutan BISA telah berkontribusi secara signifikan dalam menjaga tingginya cakupan anak usia 12-59 bulan yang menerima setidaknya dua dosis suplementasi vitamin A, dengan angka 98,4% pada tahun 2021¹⁵ dan 97,9%¹⁶ pada tahun 2022.

Di antara kabupaten yang menerima intervensi BISA, Kabupaten Kupang menunjukkan perbaikan yang paling signifikan dalam cakupan suplementasi vitamin A, mencapai 81,3% di tahun 2020 dan 96,9% di tahun 2022. Perbaikan ini dimungkinkan oleh (i) peningkatan komitmen dari para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, (ii) peningkatan manajemen program suplementasi vitamin A melalui verifikasi data penerima manfaat, dan (iii) pelaporan yang tepat waktu di tingkat Puskesmas. Selain tenaga kesehatan, berbagai pemangku kepentingan setempat mengunjungi Posyandu selama bulan Februari dan Agustus¹⁷ untuk memastikan bahwa semua anak balita datang ke Posyandu untuk menerima suplementasi vitamin A. Para pemangku kepentingan ini antara lain bupati, ketua PKK kabupaten, pemuka agama dan tokoh masyarakat.

8 WHO (2007) Urusan semua orang: memperkuat sistem kesehatan untuk meningkatkan hasil kesehatan: Kerangka kerja WHO. World Health Organization: Jenewa, Swiss.

9 Secara keseluruhan, BISA mendanai 28 pelatihan dan memfasilitasi tiga pelatihan di Dinkes Provinsi/Kabupaten (IYCN, TTD Rematri untuk Kader Pemuda, dan Replikasi Pelatihan Mekanisme dan Manajemen Rantai Pasokan)

10 Jumlah Puskesmas yang berpartisipasi dalam pelatihan program TTD Rematri: Bandung Barat 17, Sumedang 15, Kupang 11, TTU 12

11 95% dan 98,5% peserta mendapat nilai minimal 80 pada saat post test pelatihan WIFAS di NTT dan Jawa Barat

12 Diukur dengan "setiap tablet TTD Rematri yang dikonsumsi".


13 Sekolah diliburkan selama kurang lebih 18 bulan terhitung Maret 2020 hingga September 2021

14 WHO. Pedoman: Suplementasi tablet tambah darah secara intermiten pada wanita menstruasi. Jenewa, Organisasi Kesehatan Dunia, 2011.

15 199.414 dari 202.636 anak usia 12–59 bulan.

16 199.799 dari 204.134 anak usia 12–59 bulan.

17 Kampanye Suplementasi Vitamin A nasional di Indonesia dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dan Agustus.



2.2 Memperkuat manajemen rantai pasokan untuk produk-produk suplemen gizi dan kesehatan yang penting

Pada tahun 2020, BISA melakukan penilaian nasional terhadap hambatan rantai pasokan fasilitas dan merekomendasikan tindakan untuk memperkuat manajemen rantai pasok. Rekomendasi ini berfokus pada:

- Memperbaiki sistem rantai pasokan (perkiraan dan manajemen persediaan komoditas gizi yang lebih baik).
- Meningkatkan keterampilan tenaga kerja kesehatan (orientasi pengembangan pengetahuan dan pelatihan di tempat kerja atau penyediaan materi pembelajaran mandiri).
- Meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dengan mengembangkan alat bantu pengawasan untuk melacak kinerja rantai pasokan dan analisis rutin data logistik.

Pada tahun 2021, BISA mengadakan pertemuan perencanaan mikro¹⁸ untuk semua Dinkes Kabupaten guna mengembangkan rencana aksi yang akan memastikan rantai pasokan tidak terganggu. BISA kemudian bekerja sama dengan Dinkes Kabupaten untuk menyelenggarakan serangkaian sesi pengembangan kapasitas¹⁹ di wilayah intervensi untuk memperkuat kapasitas staf kesehatan. Sebagai hasil dari kegiatan pengembangan kapasitas ini, koordinasi antara pelaksana program (petugas gizi, penanggung jawab program penanggulangan diare, dan bidan koordinator) dan apoteker meningkat. Hal ini menghasilkan perencanaan dan estimasi komoditas zat gizi mikro dan pemberian layanan yang lebih baik.

Sebagai hasil dari pelatihan manajemen rantai pasokan, tidak ada laporan kehabisan stok tablet tambah darah (TTD), zink, dan oralit di Puskesmas di Bandung Barat dan Sumedang pada kuartal terakhir tahun 2022. Di Kabupaten Kupang dan TTU, Puskesmas mencatat kehabisan stok zink dan oralit karena persediaan yang kadaluwarsa dan tidak tersedianya LPLPO²⁰ pada kuartal terakhir tahun 2022. Untuk mengatasi tantangan ini, BISA mengadakan pertemuan evaluasi dengan Dinkes Kabupaten untuk membahas solusi. Solusi yang diusulkan meliputi:

- Melakukan inventarisasi komoditas gizi secara berkala di Puskesmas;
- Permohonan pengajuan ke gudang farmasi kabupaten setidaknya tiga bulan sebelum masa kadaluwarsa komoditas gizi; dan
- Meningkatkan koordinasi di antara staf farmasi, bidan dan staf gizi untuk memperkirakan komoditas gizi yang dibutuhkan.

2.3 Memperkuat sistem informasi kesehatan

Sistem informasi kesehatan yang kuat, didukung dengan data yang tepat waktu dan kredibel, merupakan tulang punggung program kesehatan masyarakat. Sistem ini sangat penting untuk melacak kinerja program, memandu pengambilan keputusan dan memastikan penggunaan sumber daya yang optimal, sehingga menjamin implementasi program yang efektif. Untuk mengatasi kesenjangan dalam sistem informasi ini, BISA memberikan sesi pelatihan bersama dengan bantuan teknis intensif di tingkat Puskesmas yang menghasilkan peningkatan jumlah Puskesmas yang menyampaikan laporan cakupan program ke Dinkes Kabupaten.

Setelah Kementerian Kesehatan mengubah pencatatan dan pelaporan dari manual menjadi berbasis aplikasi pada bulan Januari 2022, Puskesmas menghadapi tantangan dalam menggunakan aplikasi daring dan memahami format baru. BISA mendukung Dinkes Kabupaten untuk memberikan orientasi kepada Puskesmas di semua kabupaten intervensi tentang e-PPBGM,²¹ serta alur pelaporan data dan cara memastikan kelengkapannya. Orientasi ini membantu mengatasi kesulitan yang dialami tenaga kesehatan dengan persyaratan pencatatan dan pelaporan yang baru. Orientasi ini dihadiri oleh 113 petugas gizi dari 104 Puskesmas di wilayah intervensi.

Pelatihan ini menghasilkan dua hasil utama:

- 1. Format pelaporan logistik yang terstandarisasi dan data yang tersinkronisasi:** Sebagai hasil dari bantuan teknis dan pemantauan rutin, semua Puskesmas di wilayah intervensi menggunakan format yang sama untuk laporan cakupan. Selain itu, semua Puskesmas menyusun laporan logistik berdasarkan abjad, sehingga memudahkan proses penyusunan laporan logistik oleh gudang farmasi menjadi lebih efisien.
- 2. Penguatan mekanisme pemantauan dan pelaporan untuk program penanggulangan diare:** Untuk memastikan pemantauan yang lebih baik terhadap penggunaan zink dan oralit untuk pengobatan diare, BISA secara konsisten mengadvokasi Dinkes Kabupaten Kupang dan TTU untuk menggunakan format yang terstandarisasi. Pada tahun 2022, kedua Dinkes Kabupaten tersebut menggunakan format pelaporan penanggulangan diare yang telah distandardisasi oleh Kementerian Kesehatan yang memungkinkan Dinkes Kabupaten untuk menilai cakupan dan efektivitas pelaksanaan program.

¹⁸ Pertemuan tersebut dihadiri oleh total 95 pegawai Dinkes Kabupaten dari kabupaten intervensi.

¹⁹ Pelatihan Mekanisme Rantai Pasokan; pelatihan Gizi Ibu dan Kesehatan Anak; sebanyak 143 peserta mengikuti kedua pelatihan tersebut; peserta berasal dari 48 Puskesmas di kabupaten intervensi.

²⁰ Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO)

²¹ Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat: an online application for community-based nutrition recording and reporting.



2.4 Meningkatkan tata kelola

Salah satu tujuan strategis BISA adalah mengadvokasi perubahan di tingkat kebijakan dan mendukung terciptanya lingkungan yang mendukung aksi dan komitmen pengentasan stunting. BISA telah bekerja sama dengan pemerintah dalam berbagai inisiatif advokasi untuk menekankan upaya penurunan stunting. Proyek ini memberikan dukungan advokasi dan bantuan teknis kepada pemerintah untuk memastikan bahwa peraturan daerah selaras dengan peraturan nasional terkini agar implementasi rencana penurunan stunting menjadi lebih efektif. Selain itu, pemangku kepentingan multisektoral juga menerima dukungan untuk memfasilitasi koordinasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan terkait dalam upaya penurunan stunting di kabupaten.

Advokasi BISA terhadap peningkatan tata kelola telah menghasilkan beberapa hasil utama sebagai berikut.

Meningkatnya pemahaman di kalangan pengambil keputusan tentang perlunya, dan komitmen untuk berinvestasi dalam penurunan stunting: BISA memfasilitasi revisi Peraturan Bupati di Sumedang dan Bandung Barat agar selaras dengan Peraturan Presiden tentang penurunan stunting, yang diterbitkan pada tahun 2021. Perbup yang telah direvisi tersebut diterbitkan pada tahun 2023. Perbup ini memberikan landasan hukum baru untuk pelaksanaan program konvergensi penurunan stunting dan memandu seluruh dinas kabupaten dan pemangku kepentingan terkait untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan menyelaraskan setiap upaya menuju program penurunan stunting nasional.

BISA juga membentuk Scaling Up Nutrition Civil Society Organisation (SUN CSO) di semua kabupaten intervensi dan mengorientasi mereka tentang strategi advokasi untuk mengadaptasi peraturan kesehatan dengan konteks lokal. Kini, SUN CSO bekerja sama dengan para pemangku kepentingan setempat untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan penurunan stunting, seperti menyediakan bantuan pangan bagi rumah tangga berisiko tinggi dan membangun kesadaran tentang gizi dan stunting di desa-desa.

Peningkatan koordinasi di antara berbagai pemangku kepentingan:

Sebagai hasil dari advokasi BISA yang berkelanjutan untuk mencapai kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik di antara lembaga-lembaga terkait (yaitu Dinkes Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kantor Kementerian Agama), para bupati di semua kabupaten intervensi mengeluarkan surat edaran yang memungkinkan lembaga-lembaga tersebut mengadopsi program TTD Rematri sebagai bagian dari tanggung jawab utama mereka dan memastikan kelancaran implementasinya.

BISA juga berperan aktif sebagai anggota Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Provinsi Jawa Barat. Proyek ini mendukung pemerintah dalam membentuk TPPS di kabupaten dan desa serta memandu pembagian tugas di antara para anggota untuk memastikan kolaborasi multi-pemangku kepentingan dan multisektor yang efektif.

BISA dan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Barat bersama-sama menyelenggarakan Side Event Stunting Summit Jawa Barat yang menyediakan platform bagi TPPS provinsi untuk mendiskusikan strategi yang efektif untuk menurunkan stunting, termasuk praktik-praktik baik dari BISA. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, BISA mendukung Bappelitbangda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan multisektoral untuk mengembangkan rekomendasi bagi anggota DPRD dan lembaga yang bertugas menangani inisiatif penurunan stunting. Rekomendasi ini berfungsi sebagai panduan untuk penyusunan rencana aksi dan anggaran penurunan stunting.



3.0 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Intervensi gizi terpadu yang dilakukan proyek BISA berfokus pada penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan pelayanan kesehatan, menjembatani kesenjangan dalam sistem informasi kesehatan, membangun kapasitas tenaga kesehatan dan petugas garis depan, dan penguatan mekanisme tata kelola. Kesimpulan dan rekomendasi utama untuk masing-masing dari empat pilar penguatan sistem kesehatan tersebut diuraikan di bawah ini.

3.1 Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan

Menyadari manfaat yang dapat diberikan oleh staf kesehatan yang terlatih dengan baik terhadap kualitas pemberian layanan kesehatan, BISA merekomendasikan **pelatihan atau pelatihan penyegaran minimal sekali setahun** untuk setiap program di tingkat Puskesmas. Hal ini akan memungkinkan penyedia layanan kesehatan di tingkat Puskesmas untuk terus mengikuti perkembangan terkini, pedoman dan praktik terbaik dalam program masing-masing, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, serta memungkinkan mereka untuk memberikan layanan kesehatan dan gizi berkualitas tinggi. Ketika merancang program pelatihan ini, penekanan khusus harus diberikan untuk meningkatkan kapasitas staf Puskesmas sebagai berikut:

- **Konseling gizi:** Bidan dan staf Puskesmas lainnya perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk memberikan konseling gizi selama pelayanan antenatal di Puskesmas, Posyandu, kunjungan rumah, layanan gizi keliling dan layanan berbasis kantor.
- **Manajemen dan evaluasi program terpadu:** Keterampilan koordinasi diperlukan untuk memastikan koordinasi terpadu di antara berbagai departemen seperti kesehatan, gizi, farmasi, dan lain-lain, di semua tingkatan (Dinkes Kabupaten, Puskesmas, Posyandu, dan masyarakat) untuk tindakan bersama dan pendekatan sinergis dalam upaya menurunkan stunting. Kepala Puskesmas akan mendapat manfaat dari pengembangan kapasitas dalam hal keterampilan koordinasi dan manajemen program terpadu, termasuk keterampilan evaluasi dan pemberian umpan balik kepada pelaksana program dan penerima manfaat.

3.2 Penguatan sistem informasi kesehatan

Penguatan sistem informasi kesehatan merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan kolaborasi antara para profesional kesehatan, spesialis Teknologi Informasi, pembuat kebijakan, dan anggota masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kualitas layanan, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, dan pada akhirnya meningkatkan hasil kesehatan bagi masyarakat. BISA merekomendasikan beberapa strategi penguatan sistem informasi kesehatan:

- **Pengembangan kapasitas:** Melatih staf Puskesmas dalam pengumpulan data, entri data, dan analisis data terutama ketika format atau platform data baru diperkenalkan (misalnya transisi dari manual ke digital). Mengembangkan materi pembelajaran mandiri (misalnya buku saku atau video tutorial) untuk membantu melatih staf baru secara lebih efisien.
- **Jaminan kualitas data:** Manajer program di tingkat kabupaten harus mendapatkan pelatihan yang memungkinkan mereka untuk melakukan pemeriksaan kualitas data dan prosedur validasi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan secara teratur, sehingga dapat meningkatkan akurasi data.
- **Integrasi data:** Berbagi data memungkinkan berbagai lembaga pemerintah untuk mengintegrasikan sumber data mereka. Integrasi ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu yang kompleks dan memfasilitasi solusi yang komprehensif. Selain itu, data yang terintegrasi memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat (contohnya, aplikasi e-SIMPATI²² yang digunakan di Kabupaten Sumedang). Hal ini mengarah pada alokasi sumber daya, perencanaan program, dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif.

22. Integrated Stunting Management Information System — Sistem informasi Penanganan Stunting Terintegrasi



3.3 Meningkatkan tata kelola

Terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah sekolah yang melaksanakan program TTD Rematri setelah BISA mengeluarkan surat edaran dan mendukung orientasi dan pelatihan bagi para pemangku kepentingan utama di kabupaten tersebut. Dengan menunjuk Dinkes Kabupaten sebagai lembaga utama, surat edaran tersebut menginstruksikan para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan program TTD Rematri untuk pencegahan anemia, sehingga dapat meningkatkan cakupan dan konsumsi.

Aksi-aksi berikut ini direkomendasikan untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola gizi.

- **Integrasi praktik-praktik baik ke dalam rencana kerja tahunan pemerintah kabupaten:** Meskipun BISA telah berhasil berkolaborasi dan mengimplementasikan intervensi dengan pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten, integrasi intervensi proyek ke dalam rencana kerja masih terbatas. Praktik-praktik baik BISA yang telah terbukti perlu dimasukkan ke dalam rencana kerja program di tingkat provinsi dan kabupaten untuk memperkuat penyediaan layanan gizi di tingkat kabupaten dan kecamatan.
- **Koordinasi rutin di antara para pemangku kepentingan utama:** Untuk memaksimalkan dampak dari upaya penurunan stunting terhadap penerima manfaat, diperlukan koordinasi yang lebih baik di antara dinas dan lembaga terkait di tingkat kabupaten dan desa. Untuk mendorong integrasi yang lebih efektif, diperlukan kemampuan koordinasi yang lebih kuat untuk menghubungkan dan melibatkan program-program lain. TPPS harus berfungsi sebagai wadah yang efektif untuk mengoordinasikan upaya-upaya di antara para pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah penting penurunan stunting. Tanggung jawab mereka dalam mengawasi pelaksanaan Delapan Aksi Konvergensi Nasional untuk Penurunan Stunting di tingkat kabupaten, serta mengawasi program-program pengentasan stunting di tingkat provinsi dan kabupaten, berperan penting dalam mencapai hasil yang positif.

BISA menyajikan rekomendasi ini berdasarkan bukti dan praktik-praktik di lapangan yang telah menghasilkan perbaikan dalam sistem kesehatan. Dengan mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi ini, sistem kesehatan dapat lebih diperkuat, memastikan keberlanjutan dan efektivitas intervensi penurunan stunting di luar proyek BISA. Perbaikan yang berkelanjutan, kolaborasi, dan keterlibatan masyarakat akan berkontribusi untuk mencapai hasil kesehatan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan di wilayah sasaran.

ANNEX



SUMEDANG BERSINAR – MENJAJAKI PENURUNAN STUNTING DI INDONESIA

Terletak di bagian utara Jawa Barat, Indonesia, Kabupaten Sumedang menjadi salah satu kabupaten yang menonjol. Sesuai dengan filosofi “*Insun Medal Insun Madangan*” atau “*terlahir untuk menerangi dunia*”, Sumedang telah mendapatkan pengakuan sebagai kabupaten terbaik dalam penurunan stunting selama tiga tahun berturut-turut. Cari tahu bagaimana pemerintah kabupaten, dengan dukungan mitra pembangunan, memajukan visi nasional pengentasan stunting dan melakukan perubahan melalui komitmen, inovasi, dan visi bersama untuk masyarakat yang lebih sehat.

Ibu hamil Sinta Nurpiani sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran anak keduanya. Ia tinggal di Kabupaten Sumedang di tengah-tengah lanskap yang indah di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ketika ia melahirkan anak pertamanya tiga tahun yang lalu, Sinta mendapatkan dukungan di Puskesmas setempat di mana ia menerima perawatan medis di lingkungan yang penuh perhatian dengan staf yang berdedikasi yang membimbingnya melalui perjalanan kehamilannya.


Puskesmas berperan penting dalam mendukung pelayanan antenatal dan 1.000 hari pertama sejak pembuahan hingga ulang tahun kedua anak. Puskesmas ditargetkan sebagai salah satu platform utama untuk mengatasi masalah kesehatan yang merajalela di negara ini: stunting pada anak-anak.

Kini, menjelang kelahiran anak keduanya, Sinta mendapatkan dukungan dan pengetahuan gizi tambahan. Ia memiliki independensi yang lebih besar untuk menentukan cara terbaik untuk merawat anak-anaknya agar mereka dapat tumbuh bebas dari bayang-bayang stunting.

Kebutuhan akan perubahan

Pada tahun 2018, hampir sepertiga anak di Indonesia (31%) mengalami stunting, dengan variasi yang sangat besar antar provinsi. Stunting terjadi karena akumulasi bertahap dari kerusakan fisik dan kognitif yang tidak dapat dipulihkan yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan pola makan yang tidak memadai. Stunting memiliki berbagai konsekuensi jangka panjang yang merugikan, termasuk buruknya kemampuan kognitif dan kinerja sekolah, hilangnya produktivitas dan peningkatan risiko penyakit terkait gizi, seperti diabetes dan obesitas. Stunting juga merupakan faktor risiko komplikasi kebidanan selama persalinan, yang berpotensi mengakibatkan cedera atau kematian pada ibu dan bayinya. Selain berdampak pada kesehatan, stunting juga berdampak pada ekonomi, dengan potensi kerugian ekonomi sebesar 2–3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan suatu negara.

Pada tahun 2019, Nutrition International dan Save the Children meluncurkan proyek Better Investment for Stunting Alleviation (BISA) untuk mendukung strategi penurunan stunting nasional Pemerintah Indonesia ke dalam aksi yang efektif di tingkat daerah. Proyek ini dimulai di empat kabupaten di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. Bekerja sama dengan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten, Nutrition International memberikan bantuan teknis dan mengadvokasi sumber daya manusia dan keuangan yang lebih baik, kebijakan serta mekanisme akuntabilitas yang lebih baik, untuk meningkatkan gizi sebelum kehamilan dan selama 1.000 hari pertama kehidupan.



“Melalui proyek BISA, kami mengintegrasikan paket intervensi yang mendukung komitmen dan prioritas pemerintah Indonesia dalam Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting,” ujar Rozy Jafar, Wakil Direktur Nutrition International di Indonesia. “Strategi ini memiliki target untuk menurunkan stunting hingga 14% pada tahun 2024.”

“Kerja sama dan koordinasi adalah salah satu upaya kunci untuk menurunkan stunting,” jelas Sumasna, mantan Kepala Bappeda Jawa Barat. “Kita harus menjadikan stunting sebagai musuh bersama di setiap lapisan masyarakat.”

Kabupaten Sumedang telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam penurunan stunting. Komitmen dari pejabat daerah, ditambah dengan implementasi BISA dan penerapan strategi yang inovatif dan efektif oleh pemerintah kabupaten, telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 32,2% di tahun 2018 menjadi 8,27% di tahun 2022, seperti yang dilaporkan oleh sistem informasi gizi nasional, e-PPGBM. Atas pencapaian tersebut, Sumedang menerima penghargaan bergengsi “Kabupaten Berkinerja Terbaik dalam Menerapkan Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Jawa Barat” selama tiga tahun berturut-turut pada tahun 2020, 2021, dan 2022.

Di bawah ini, kami mengeksplorasi bagaimana hal ini dapat terwujud melalui penguatan Puskesmas, inovasi digital, dan manajemen rantai pasokan.

Memperkuat lini depan

Sebelumnya, tenaga kesehatan di Sumedang menghadapi tantangan dalam mengakses pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi yang berkualitas secara efektif. BISA memungkinkan hal ini terjadi. “Kami belum pernah mendapatkan pelatihan untuk staf kami yang sifatnya sangat teknis, seperti untuk menurunkan stunting,” kata Dadang Sulaeman, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. “Dengan BISA, kami mulai mendiskusikan masalah yang kami hadapi dan kemudian membuat rencana aksi bersama.”

Penanggulangan stunting dimulai dengan pelayanan antenatal yang berkualitas selama kehamilan. Salah satu kendala mendasar dalam perjalanan Sumedang adalah perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah stunting sedini mungkin. Sumasna mencatat bahwa meskipun prevalensinya tinggi, stunting pada awalnya hanya dipahami oleh tenaga kesehatan. Untuk mengatasi hal ini, ia mengatakan, “kami telah mencoba untuk berkomunikasi, menyebarkan, dan memberikan edukasi ke setiap tingkatan, dari pemerintah hingga masyarakat.”

Di Puskesmas tempat Sinta menerima perawatan, para stafnya telah dibekali dengan pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan keluarganya melalui pendidikan gizi. “Puskesmas berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan, terutama dalam meningkatkan layanan gizi,” kata Siti Nur, Kepala Puskesmas Situraja di Sumedang.

Selain pemeriksaan kesehatan rutin—termasuk tekanan darah, tes laboratorium, USG, dan pemantauan berat badan—Sinta juga menerima konseling untuk menjaga pola makan yang seimbang

dan bergizi serta pentingnya mematuhi suplementasi tablet tambah darah, serta persiapan pemberian ASI eksklusif.

Inovasi melalui digitalisasi

Selain pelatihan, Sumedang juga memanfaatkan digitalisasi dalam inisiatif penurunan stunting melalui pengembangan dua aplikasi digital yang inovatif.

Sistem Informasi Penanganan Stunting Terintegrasi (eSimpati) adalah alat perintis yang menyediakan data stunting yang komprehensif di kabupaten tersebut, termasuk data statistik anak-anak yang terkena dampak stunting, prevalensi di desa-desa, dan data analitik tentang penyebab stunting di wilayah tertentu. Sejak tahun 2020, semua anak di Sumedang telah ditimbang dan datanya dimasukkan ke dalam aplikasi. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh staf Puskesmas di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten.

Dengan menggunakan kecerdasan buatan, eSimpati menyesuaikan rekomendasi dengan tantangan stunting yang unik di setiap desa, sehingga memungkinkan tindakan perbaikan yang cepat. Hal ini tidak hanya memfasilitasi pemantauan yang lebih dekat oleh para pemangku kepentingan, tetapi juga memungkinkan masyarakat umum dan orang tua untuk memeriksa status gizi anak-anak mereka.

“Sistem ini sangat efektif karena stunting tidak hanya diketahui oleh jajaran tenaga kesehatan, tetapi sekarang semua orang di Sumedang sudah mengetahui apa itu stunting,” ujar Dadang tentang keberhasilan aplikasi ini dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. “Stunting menjadi masalah sosial. Kalau misalnya ada anak yang mengalami stunting, orang tua langsung berkonsultasi dengan kepala desa dan camat.”

Terkesan dengan keberhasilan implementasi eSimpati di Sumedang, Kementerian Kesehatan secara aktif mereplikasi strategi kabupaten tersebut dan memperluas sistem berbasis elektronik ini secara nasional untuk mempercepat penanganan stunting.

Menyadari pentingnya peran sistem rantai pasokan yang lancar untuk komoditas gizi, BISA mengadakan pelatihan perencanaan mikro untuk meningkatkan keterampilan manajemen rantai pasokan bagi tenaga kesehatan. Rita Juwita adalah Kepala Seksi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Ia mengatakan bahwa prakiraan manual, kehabisan stok, dan kelebihan stok menciptakan hambatan yang perlu diatasi.

“Rantai pasokan yang baik sangat berpengaruh dalam menurunkan stunting,” jelas Rita. “Ketika produk zat gizi mikro tersedia di semua layanan kesehatan, maka akan sangat berpengaruh terhadap penurunan angka stunting secara cepat.” Menanggapi hal tersebut, Rita dan unit farmasi mengembangkan eFarmasi, sebuah aplikasi manajemen inventaris yang mendigitalkan seluruh inventaris komoditas dan proses permintaan, sehingga membuat layanan kesehatan lebih mudah diakses. eFarmasi telah diperkenalkan ke semua puskesmas di kabupaten tersebut, sehingga tidak ada lagi kekurangan pasokan suplemen zat gizi mikro di 35 puskesmas yang ada di kabupaten tersebut.



Menyambut masa depan yang cerah

Motto Kabupaten Sumedang, “*Insun Medal Insun Madangan*” diterjemahkan menjadi “terlahir untuk menerangi dunia.”

Bagi Sinta, konsultasi rutin dengan staf Puskesmas telah menghasilkan kehamilan yang sehat. Ia sangat menantikan kehadiran bayinya dan berharap akan masa depan yang cerah bagi anak-anaknya. “Harapan saya untuk anak-anak saya, semoga mereka bisa sukses, sehat dan berguna bagi bangsa dan negara.”

Berkat aksi kolektif dan saling terkait yang dilakukan di bawah proyek BISA, kabupaten ini menjadi contoh cemerlang dalam penurunan stunting. Selain memperkuat sistem kesehatan dan rantai pasok, Sumedang juga telah membuat kemajuan legislatif yang signifikan. Kabupaten ini telah mengeluarkan peraturan daerah yang sejalan dengan Peraturan Presiden, yang memungkinkan konvergensi semua upaya penurunan stunting oleh berbagai pemangku kepentingan.

Penurunan stunting terus menjadi prioritas bagi Pemerintah Indonesia seiring dengan upaya untuk mencapai tujuannya dalam mengeliminasi stunting dan meningkatkan kesehatan dan gizi ibu, anak, dan remaja. “Keterlibatan BISA dalam program pembinaan, edukasi, dan inovasi memberikan sentuhan baru dalam upaya kita bersama mewujudkan target Jawa Barat bebas stunting,” ujar Sumasna.

Dengan dukungan dari berbagai mitra dan sektor, pemerintah bertujuan untuk mereplikasi keberhasilan ini di daerah lain untuk mengurangi angka stunting, wasting, berat badan kurang dan berat badan lebih pada anak-anak, serta anemia pada ibu hamil. BISA telah berperan penting dalam mendorong upaya penurunan stunting di Indonesia.

BISA
stop stunting!

 **NUTRITION**
INTERNATIONAL

 **Save the Children**